



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Beri Kesaksian Berbelit, JPU Bentak Sekwan

BENGKULU – Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas (Randis) di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017, kemarin (18/2) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma menghadirkan lima orang saksi, pejabat di Sekretariat DPRD Seluma. Yakni Sekwan Eddy Soepriadi, Kabag Keuangan Khaerudin, Kabag Umum Haswan, Kasubag Hukum Rustam Efendi dan Kasubag Rumah Tangga, Omi.

Dari lima saksi yang dihadirkan, JPU fokus bertanya ke Sekwan. Mengingat Eddy Soepriadi telah empat tahun

menjabat Sekretaris DPRD Seluma. Selain itu sebagai Sekwan Eddy Soepriadi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di DPRD Seluma. Namun dalam menjawab pertanyaan JPU, Eddy terkesan berbelit-belit, sehingga JPU Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari, SH sempat membentak Eddy Soepriadi.

“Saksi Eddy, saya minta anda tidak berbelit-belit menjawab pertanyaan kami. Jawaban yang saudara berikan menyangkut nasib kedua terdakwa dan orang banyak,” bentak Dewi.

Walaupun telah mendapat bentakan dari JPU, jawaban yang diberikan Eddy tetap membingungkan. Eddy mengaku tidak mengetahui seperti apa mekanisme keuangan di DPRD Seluma. Karena

alibi Eddy yang mengurus keuangan ini adalah Bagian Keuangan.

“Saya itu hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban, saya tidak pernah melakukan pengecekan penggunaan anggaran tersebut,” kata Eddy.

Eddy menyampaikan terkait pencairan anggaran BBM dan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak sesuai struk pembelian BBM yang menimbulkan kerugian Rp 700 juta lebih. Eddy beralasan untuk struk BBM tidak pernah masuk ke meja kerjanya.

“Kalau yang tanda tangan proses pencairannya memang saya dan bendahara. Tapi kalau untuk struk saya tidak tahu, karena struk BBM ini tidak pernah naik ke meja saya,” terang Edi.

Sementara Kabag Keuangan, Khaerudin ketika ditanya JPU mengatakan penggunaan anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas ini menggunakan sistem edcos (berapa yang dipakai itu yang dibayarkan). Namun pada prakteknya banyak dewan yang tidak membuat SPJ pemeliharaan kendaraan dinas dan menyerahkan struk BBM ini. Sehingga membuat kewalahan dirinya, padahal semua pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan saat audit BPK.

“Cara mengatasinya, akhirnya dibuatkan SPJ dan struk fiktif yang kami buat di Hotel Kuala View,” terang Khaerudin.

Khaerudin mengatakan hal ini telah pernah disampaikan agar anggota DPRD Seluma periode 2014-2019 ini tertib

administrasi. Namun tetap masih ada yang membangkang dan tidak mengikuti. Sehingga terjadilah temuan saat audit BPK tahun 2018 untuk realisasi anggaran 2017 tersebut.

“Seperti itulah kondisinya. Sehingga terjadi temuan saat audit BPK RI tahun 2018 tersebut,” sampai Khaerudin.

Usai mendengarkan keterangan semua saksi Majelis Hakim PN Bengkulu yang diketuai oleh Riza Fauzi, SH, CN dengan Hakim Anggota Nich Samara, SH, MH dan Yosi Astuty, SH menutup sidang. Sidang akan dilanjutkan Kamis (20/2).

“Sidang kita tutup, kita lanjutkan Kamis (besok,red) dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi,” tukas Riza.(aba)